



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518  
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Jakarta, 3 Desember 2025

Nomor : PPE.PP.01.05-5198  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Yth. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
di-  
Jakarta

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/386/HK.01/2025 tanggal 10 Oktober 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PANRB, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ketenagakerjaan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan atau materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.



KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518  
Laman: [www.ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id), Pos-el: [humas.djpp@gmail.com](mailto:humas.djpp@gmail.com)

### Berita Acara Harmonisasi

Pada hari ini Jumat, 28 November 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Rejeki Nawangsasih  
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum  
Instansi : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Muhammad Waliyadin  
Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II  
Instansi : Kementerian Hukum

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

Menyatakan:

- berdasarkan surat permohonan harmonisasi dari Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/386/HK.01/2025 tanggal 10 Oktober 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PANRB, Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan dan menyelesaikan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ketenagakerjaan dengan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Tim Kerja Harmonisasi Kementerian Hukum;
- substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
- dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Pemrakarsa,

Sri Rejeki Nawangsasih

Pembina Tim Harmonisasi,

Muhammad Waliyadin

Mengetahui  
Direktur Harmonisasi  
Peraturan Perundang-undangan II,

Muhammad Waliyadin